



RENCANA KERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

2026

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut telah dilakukan revisi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan RKA-KL Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Tahun Anggaran 2026, maka di anggap perlu untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2026. Penyusunan RKT PPN Pengambengan tahun 2026 ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pencapaian kinerja dari sasaran (target) masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari segi fisik maupun segi pembiayaan pada PPN Pengambengan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Revisi RKT PPN Pengambengan Tahun 2026 akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja lingkup kinerja PPN Pengambengan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kinerja di PPN Pengambengan.

Jembrana, Januari 2026

Kepala Pelabuhan

Kartono

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS.....	4
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Sasaran Strategis	5
BAB 3 RENCANA KINERJA.....	7
3.1 Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026.....	7
3.2 Rencana Aksi.....	8
BAB 4 PENUTUP	12

Daftar Tabel

Tabel 1. Target Kinerja PPN Pengambengan Tahun 2026	7
Tabel 2. Anggaran PPN Pengambengan Tahun 2026.....	7
Tabel 3. Rencana Aksi	8
Tabel 4. Dukungan Anggaran dari RKAKL	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Dalam RPJPN 2025–2045, salah satu misi yang terkait langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah misi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misi ini menekankan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta kontribusi signifikan sektor maritim terhadap PDB nasional, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya berpedoman pada Rencana Aksi Program DJPT maka PPN Pengambengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, dan akan dilaksanakan oleh PPN Pengambengan melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026.

1.2 Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan PPN Pengambengan Tahun 2026 adalah:

a. **Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam aksi tahunan**

RKT menjadi turunan dari Renstra KKP dan Renja Ditjen Perikanan Tangkap, sehingga setiap program di PPN Pengambengan memiliki target jelas per tahun.

b. **Meningkatkan efektivitas pengelolaan pelabuhan perikanan**

Mengatur kegiatan operasional (penangkapan, pendaratan, distribusi ikan) agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tertib administrasi.

c. **Mendukung ekonomi biru dan kesejahteraan nelayan**

Memberikan fasilitas, layanan, dan dukungan bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.

d. **Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran**

RKT menjadi pedoman penggunaan DIPA/anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

e. **Mengukur kinerja tahunan**

Menetapkan indikator kinerja (produksi ikan, pelayanan kapal, pengawasan sumber daya, konservasi) yang dapat dievaluasi setiap akhir tahun.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

BAB 2

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Berdaulat** diartikan sebagai Kemampuan penuh bangsa dalam mengelola, mengawasi, dan memanfaatkan sumber daya ikan secara legal dan berkeadilan. Menjamin kedaulatan ekonomi melalui penguatan nelayan tradisional, pemberantasan *illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)*, serta penguasaan teknologi penangkapan modern.
2. **Mandiri** diartikan sebagai Kemandirian masyarakat perikanan dalam mengelola sumber daya tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Didukung oleh akses pembiayaan, infrastruktur pelabuhan perikanan, dan sistem logistik ikan yang kuat..
3. **Berdaya saing** diartikan sebagai Peningkatan kualitas produk perikanan tangkap agar mampu bersaing di pasar global. Penguatan standar mutu, sertifikasi internasional, dan hilirisasi industri pengolahan hasil laut.
4. **Berkelanjutan** dimaksudkan sebagai Pengelolaan sumber daya ikan dengan prinsip konservasi, kuota tangkap berbasis scientific-based management, serta perlindungan ekosistem laut (mangrove, terumbu karang, padang lamun). Menjamin keberlanjutan stok ikan untuk generasi mendatang.
5. **Kesejahteraan** diartikan bahwa Peningkatan taraf hidup nelayan melalui perlindungan sosial, akses pasar, dan distribusi hasil yang adil. Mendorong transformasi masyarakat pesisir menjadi lebih produktif, inklusif, dan berdaya.

2.2 Sasaran Strategis

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui mengembangkan SDM masyarakat perikanan tangkap yang adaptif terhadap teknologi, berdaya saing global, dan berorientasi pada keberlanjutan. Fokus pada pendidikan, pelatihan, dan perlindungan sosial bagi nelayan serta pembudidaya ikan;
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap PDB nasional melalui modernisasi armada, hilirisasi industri pengolahan, dan penguatan rantai pasok. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dengan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan integrasi logistik ikan;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui Mengelola sumber daya perikanan berbasis scientific-based management dengan kuota tangkap, zonasi, dan konservasi ekosistem laut. Memperluas kawasan konservasi laut, restorasi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun untuk menjaga keberlanjutan stok ikan; dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan memperkuat tata kelola DJPT dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Digitalisasi layanan perizinan, pengawasan berbasis teknologi (e-monitoring, VMS, e-logbook), serta integrasi data perikanan tangkap dengan sistem nasional (SPAN, SAKTI).

Untuk tahun 2026 ada beberapa sasaran kegiatan yang akan dikerjakan serta ditargetkan untuk memenuhi dalam pengukuran dan penilaian kinerjanya PPN Pengambengan. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan dengan indikator kinerjanya adalah Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengambengan (Rp juta)
2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan meningkat dengan indikator kinerjanya adalah volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (ton)
3. Pengelolaan PPN Pengambengan yang berdaya saing dengan indikator kinerjanya adalah:

- a) Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
 - b) Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
 - c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - d) Persentase Pengendalian pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - e) Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Pengembangan (Nilai)
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan yang optimal dengan indicator kinerja berupa:
- a) Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)
 - b) Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan (nilai)
5. terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Pengembangan dengan indikator kegiatan yaitu
- a) Nilai PM Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - c) Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - d) Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)
 - e) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - f) Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - g) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - h) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)

BAB 3

RENCANA KINERJA

3.1 Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan PPN Pengembangan Tahun 2026, maka target kinerja dan anggaran PPN Pengembangan adalah sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Target Kinerja PPN Pengembangan Tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)	790,511
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	20.366,43
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	86
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	86
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,50
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1.851
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	86
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	77
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	82
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88,8

Tabel 2. Anggaran PPN Pengembangan Tahun 2026

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Target	Anggaran
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		31.845.408.000
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	2.0 Lembaga	404.898.000
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.0 Unit	31.440.510.000
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen		13.461.424.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		13.461.424.000
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	1.0 Unit	22.500.000
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	13.323.924.000
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit, m2, Paket	115.000.000

3.2. Rencana Aksi

Tabel 3. Rencana Aksi

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	NAMA KEGIATAN
1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)	790,511	Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	20.366,43	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	100	Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Investasi, Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan
4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	86	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	86	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,5	Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	33	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1.851	Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelayakan Kapal Perikanan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28	Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	75,5	Pelaksanaan WBK di lingkungan PPN Pengembangan
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	86	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
12	Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88,2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	84,5	Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan pegawai ASN
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	77	1.Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 2.Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3.Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	82	Pengelolaan dan penggunaan BMN
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	92,1	Laporan program dan kegiatan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	71,75	laporan program dan keuangan
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88,8	Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan

Tabel 4. Dukungan Anggaran dari RKAKL

No.	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	NAMA KEGIATAN
1	Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Pengambengan (Rp Juta)	66.998.000	Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	50.502.000,00	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)	19.922.000	Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Investasi, Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan
4	Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)	126.854.000	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	40.322.000	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	274.464.534.000	Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	70.530.000	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	0	Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelayakan Kapal Perikanan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	29.770.000	Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	0	Pelaksanaan WBK di lingkungan PPN Pengambengan
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	0	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
12	Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	0	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran

13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	9.818.432.000	Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan pegawai ASN
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	3.640.832.000	1.Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 2.Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3.Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	2.160.000	Pengelolaan dan penggunaan BMN
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	0	Laporan program dan kegiatan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	0	laporan program dan keuangan
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	0	Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan

BAB 4

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen rencana strategis untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan akan lebih mudah melaksanakan manajemen program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.